

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan ASN

Agung Gumilang¹, Wartoyo^{2*}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Siber Syeh Nurjati

* E-mail Korespondensi: agunggumilang_03@yahoo.com

Information Article

History Article

Submission: 31-12-2024

Revision: 02-01-2025

Published: 12-01-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v5i2.77

A B S T R A K

Menanggulangi kemiskinan menjadi kewajiban negara. Kemiskinan menjadi inti persoalan pembangunan. Permasalahan utama dalam kemiskinan terletak pada penguasaan database penduduk miskin, rencana dan penganggaran diikuti dengan intervensinya serta pelibatan unsur pembangun di luar pemerintah. Pemerintah Kabupaten Cirebon menggagas pendekatan lain dalam pronangkis dengan cara memperbaiki komunikasi dan kordinasi melalui grup media sosial *whatsapp* yang lebih *flexible*, *inclusive* dan melibatkan banyak pihak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis sinergitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon. Metode penelitian menggunakan data berupa laporan dan hasil observasi langsung terhadap para aparatur dan mitra kerjanya. Deskripsi analisis didukung kajian literatur terkait tema penelitian digunakan untuk mendapatkan hasil riset yang objektif. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan sinergitas yang kuat diantara para pemangku kepentingan pembangunan yang dimotori langsung ASN cukup mempermudah dan mempercepat layanan program kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Kebutuhan layanan baik berupa jaminan perlindungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dapat dilakukan lebih inklusif, a-birokratif, mudah dan cepat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan, Kesejahteraan sosial

A B S T R A C T

Tackling poverty is a state obligation. Poverty is the core of the development problem. The main problem in poverty lies in the mastery of the poor population database, planning and budgeting followed by intervention and the involvement of development elements outside the government. The Cirebon Regency Government initiated another approach in prevention by improving communication and coordination through a more flexible, inclusive and multi-party WhatsApp social media group. This paper aims to find out how the poverty alleviation approach is based on the synergy of the State Civil Apparatus (ASN) in Cirebon Regency. The research method uses data in the form of reports and direct observation results of the apparatus and their partners. Analytical descriptions supported by literature reviews

Acknowledgment

related to the research theme are used to obtain objective research results. The results show that effective communication and strong synergy between development stakeholders directly driven by ASN are quite easy and accelerate poverty program services in Cirebon Regency. The need for services in the form of social protection guarantees and economic empowerment programs for poor families can be carried out more inclusively, a-bureaucratically, easily and quickly.

Key word: *Poverty, Empowerment, Social welfare*

© 2024 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini dapat disebabkan karena lemahnya daya beli. Kemampuan ekonomi seseorang terbatas kecuali hanya untuk kebutuhan paling mendasar yaitu makan dan minum sehari-hari. Ketidakmampuan ini disebabkan karena pilihan hidup terbatas justru karena seseorang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berdampak langsung terhadap besarnya penghasilan seseorang.

Islam mempunyai perhatian khusus terkait isu kemiskinan baik dari sisi konsep maupun penanganannya. Kata yang familiar dalam menggambarkan kemiskinan adalah kata ‘fakir’ dan kata ‘miskin’. Menurut Saad Ibrahim, kata ‘fakir’ atau kefakiran merupakan kondisi kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan kajian dari beberapa ayat dalam al-Quran yang secara khusus membahas tentang fakir. Didalam al-Quran kata faqir adalah bentuk mufrad fuqara bentuk jama’nya, dan faqr bentuk mashdarnya.

Kata-kata tersebut memiliki berbagai arti dan terdapat pada sepuluh surah yang dirinci dalam tiga belas ayat. Sedangkan kata ‘miskin’ sangat sering disinggung dalam al-Quran dengan makna seseorang yang tidak berdaya. Kata miskin adalah bentuk tunggal, masakin bentuk jama’nya, dan maskanah bentuk mashdarnya. Kata-kata tersebut termuat dalam dua puluh lima ayat yang tersebar dalam Sembilan belas surah. Dari hasil kajian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir dan miskin sama - sama membutuhkan bantuan. Dari sisi perbedaan, fakir, peluangnya untuk menjalani kehidupan masih dapat dijalani, sementara miskin bermakna sebaliknya yaitu peluangnya sangat rendah dalam menjalani kehidupan.(HM. Saad Ibrahim, dalam Ismail : 2020).

Nilai-nilai sosial dalam Islam.

Islam sangat menganjurkan nilai kebaikan untuk memuliakan harkat martabat manusia. Umat muslim diminta untuk saling membantu, tolong-menolong dalam kebaikan terutama yang menyangkut hajat hidup saudaranya yang lebih membutuhkan. Allah SWT mengingatkan umatnya untuk saling tolong-menolong diantara sesama saudaranya, seperti tertuang dalam beberapa ayat suci AlQuran dan hadits :

AlQuran :

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya". (QS.AlMaidah : 2)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Albaqoroh : 195)

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Albaqoroh : 271)

Hadits

Dari An-Nu'man bin Basyir RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan kaum mukmin dalam saling cinta, saling mengasihani, dan belas kasih mereka bagaikan satu jasad. Apabila satu anggotanya sakit maka seluruh tubuh akan merasakan tidak bisa tidur dan demam." (HR Muslim)

Artinya: "Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya". (HR.Muslim)

‘Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat

berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka.” (HR. Al Bukhari)

Secara umum, BPS di Indonesia dan juga beberapa negara lain di dunia mengartikan penduduk miskin sebagai suatu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Ambang batas seseorang dikatakan miskin atau tidak adalah terletak pada kemampuan individu memiliki kemampuan daya beli minimal berupa besaran angka garis kemiskinan (GK). Artinya bila seorang berpenghasilan melebihi angka GK maka dikatakan sebagai penduduk sejahtera dan sebaliknya bila di bawah GK, maka yang bersangkutan masuk kategori penduduk miskin.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dimaknai bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tidak hanya dari sisi materi melainkan juga psikologi, sosial, dan spiritual. Dalam menyikapinya negara dan masyarakat memiliki kewajiban dalam membantu dan menjamin kehidupan yang layak. (Ismail, 2020:116)

Ketidakterdayaan masyarakat miskin seringkali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menjalani aktifitas hidup sehari-hari. Mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah, pada umumnya menemui kesulitan dalam bekerja. Mereka tidak memiliki pekerjaan, walaupun bekerja, penghasilannya sangat kecil, hanya cukup untuk keperluan hidup hari itu. Di lapangan, biasanya mereka hanya terserap di sektor informal, pekerja kasar, buruh serabutan dengan jam kerja lebih dari delapan jam sehari dan pendapatan minimum. Ini berarti tingkat pendidikan akan berdampak terhadap jumlah penghasilan yang diterima.

Dalam jurnal ilmiah berjudul : ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI’ yang ditulis Rudi Susanto dan Indah Pangesti (2019) didapat beberapa teori yang menyatakan bahwa pendidikan diakui secara luas, memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Bloom, 2006). Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung

melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010). Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain kesehatan dan ekonomi. Menurut Gillis (2000) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting. Pertama karena banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Kedua, karena banyak hasil observasi yang menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan status sosial di masyarakat akan terangkat.

Selain persoalan minimnya penghasilan, karena terbatasnya ilmu pengetahuan ini, komunitas warga miskin seringkali ‘disorientasi sosial’ dan kehilangan fungsi sosialnya sebagai manusia. Mereka tidak memiliki perencanaan hidup yang jelas, apalagi tabungan untuk mendukung keperluan hidup pada waktu mendatang.

Bahkan di dalam aktifitas social mereka sering mendapatkan pelayanan buruk. Menjadi masyarakat kelas tiga yang mau disuruh-suruh (dipingpong) dari satu unit layanan public ke layanan yang lain. Misal saat mereka mengurus hak-hak bantuan social yang seharusnya diterima dari instansi pemerintah seperti bantuan pangan, jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan ataupun uang tunai, mereka menunggu lama, atau pergi ke beberapa unit layanan public tanpa kepastian mendapatkan hasil yang diharapkan.

Tentu, pandangan ini sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian. Karena bila dibiarkan, secara social bertentangan dengan prinsip dan nilai kebaikan kemanusiaan. Bahkan kondisi ini dapat menyebabkan fungsi social keluarga miskin makin hilang. Secara ekonomi, beban pengeluaran mereka akan makin berat karena system pelayanan public pemerintah yang belum professional.

Dalam membantu komunitas rentan social diperlukan satu konsep pemberdayaan agar kemiskinan dapat didekati dengan cara yang radikal hingga ke akar permasalahannya. Karena selama ini, penanganan kemiskinan terlalu kaku, dan cenderung focus ke hal-hal yang lebih

bersifat proyek, dirancang dan dianggarkan menggunakan anggaran pemerintah. Dalam praktiknya pronangkis menggunakan pendekatan berbasis APBN/ D lebih banyak aktifitas menu-nggu, terlalu birokratif dan cenderung tidak praktis, inefektif dan inefisien. Sementara data Masyarakat miskin itu sangat dinamis dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.

Artikel ini dilatarbelakangi oleh kondisi kesejahteraan sosial yang memprihatinkan. Indikasinya angka kemiskinan yang cukup tinggi baik nasional, regional maupun lokal di Kabupaten Cirebon sebesar 11%. Bila pendekatannya belum dirumuskan secara ideal maka permasalahan kemiskinan akan terus menjadi persoalan pembangunan yang serius. Dampaknya kualitas hidup masyarakat yang buruk dan stagnasi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Di lingkungan birokrat pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur pembangun negeri utama yang keberadaanya sangat diharapkan dalam memecahkan persoalan Pembangunan, salah satu dan esensial adalah terakit penanggulangan kemiskinan.

Sehingga, dalam tulisan ini kami ingin membahas terkait bagaimana seharusnya sektor layanan public yang didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) melayani segenap masyarakat, tidak terkecuali keluarga miskin.

Untuk lebih focus dan memudahkan penelitian, penulis mengambil studi kasus sebagai pemodelan program penanggulangan kemiskinan berbasis ASN di Kabupaten Cirebon.

ASN memiliki peran strategis dalam pelayanan public. Mereka terdiri dari pegawai negeri sipil yang direcruit, dikembangkan kariernya hingga menjelang masa purna baktinya dalam suatu system administrasi kepegawaian negara. Secara social, ASN dikategorikan sebagai komunitas masyarakat kelas dua (menengah) dengan pendapatan gaji rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Tentu, bila ASN tersebut menduduki suatu jabatan khusus baik structural maupun fungsional, maka penghasilannya akan lebih besar lagi.

Sifat strategis ASN terletak pada fungsi profesi yang mengampu urusan pemerintahan dan pembangunan. Mulai dari sektor social, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup dapat dilayani oleh ASN sebagai mesin birokrasi pemerintahan. Semakin baik visi, maka akan semakin berkinerja sebuah pemerintahan, dan sebaliknya.

Sehingga, dari uraian singkat tentang suasana kebathinan ASN sebagai pegawai negeri sipil, maka menarik untuk dikaji juga visi dan perannya dalam menangani kemiskinan sebagai suatu gerakan moril, bukan sebatas proyek pembangunan formal pemerintah.

Dalam kaitan tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana performa kinerja ASN lintas unit kerja di Kabupaten Cirebon, terutama dalam visinya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Cirebon

METODE

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan data primer berupa laporan formal dokumen pembangunan yang didapatkan dari instansi pemerintah atau lembaga social keagamaan juga beberapa data sekunder berupa referensi yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan media sosial.

Data dan informasi dikelompokkan, direduksi, diolah dan dianalisa sehingga sampai pada satu gambaran penelitian yang general dan khusus. Agar pembaca dapat memahami penelitian ini dengan mudah maka penulis menyusunnya secara sistematis, mulai mengelompokkan data dan informasi yang memiliki tema kajian yang sama, mengolah dan menganalisisnya sesuai dengan beberapa pertanyaan penelitian yang sudah disiapkan, seperti apa urgensinya program penanggulangan kemiskinan, bagaimana tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Cirebon, apa penyebab kemiskinan sulit diatasi, bagaimana pelibatan para actor pembangunan dalam pronangkis dan bagaimana relevansi dengan pemodelan pemberdayaan ASN sebagai sumber alternatif penanganannya serta seperti apakah hasil kajian tentang pronangkis berbasis ASN yang dilakukan sebelumnya.

HASIL

Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon

Secara nasional penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar jumlahnya. Data BPS melansir persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk mis-

kin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Adapun garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen).

Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, sebagaimana dirilis ulang dalam portal Jabarprovgoid tanggal 2 Juli 2024 berjudul : Jumlah Masyarakat miskin di Jawa Barat turun (sumber : <https://jabarprov.go.id/berita/jumlah-penduduk-miskin-di-jawa-barat-turun-14213>) menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada Maret 2024 sebesar 7,46 persen, menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun sebesar 0,52 persen poin terhadap September 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 3,89 juta orang, menurun 39,93 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 204,94 ribu orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,19 persen, turun menjadi 7,07 persen pada Maret 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 9,30 persen, turun menjadi 9,07 persen pada Maret 2024.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp524.052/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.347 (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp132.705 (25,32 persen). Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon, angkanya masih belum mengembirakan. Rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Cirebon masih di atas angka kemiskinan baik nasional maupun provinsi.

BPS Kabupaten Cirebon melaporkan bahwa :

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 245,92 ribu orang (11 persen) menurun 3,26 ribu orang dibanding penduduk miskin tahun sebelumnya yang sebesar 249,18 ribu orang (11,20 persen).

Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebesar Rp 475.046 per kapita per bulan sementara pada tahun 2023 sebesar Rp. 451.853 per kapita per bulan atau naik sebesar 5,13 persen.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cirebon terjadi penurunan dari 1,98 pada tahun 2023 menjadi 1,69 pada tahun 2024. Ini menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cirebon terjadi penurunan dari 0,53 pada tahun 2023 menjadi 0,36 pada tahun 2024. Ini menunjukkan ketimpangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil.

Bila memperhatikan angka kemiskinan, maka Kabupaten Cirebon masih di atas angka rerata kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat. Angka kemiskinan : nasional 9,03%, Provinsi Jawa Barat 7,46%, sedangkan Kabupaten Cirebon masih di 11%.

Bahkan angka kemiskinan terus naik setelah terjadi wabah pandemi covid-19. Secara lokal kondisi ini dapat dilihat dari angka statistik jumlah penduduk miskin di Kabupten Cirebon saat pandemi, dari mulai 2019, 2020 dan 2021 secara berurutan prosentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan rata-rata 1.7% per tahun yaitu 9,94%, 11,24% dan 12,30%. (Agung Gumilang : 2022).

Posisi kesejahteraan social Kabupaten Cirebon masih belum menggembirakan karena ternyata Kabupaten Cirebon berada pada klasmen 5 papan bawah dengan penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat. Memperhatikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Cirebon, maka perlu ada rencana intervensi yang tepat agar pronangkis dapat berhasil dan berdaya guna, Masyarakat miskin harus meningkat pendapatannya, berkurang beban pengeluarannya dan terfasilitasi kebutuhan hidupnya.

Pronangkis berbasis ASN :

Prihatin terhadap permasalahan yang sama yaitu capaian kinerja pronangkis, maka kami dan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Cirebon Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan informasi_ bermusyawarah untuk turut membantu menangani persoalan kemiskinan bersama.

Kami melihat beberapa celah kelemahan terkait pronangkis yang dilakukan secara formal oleh SKPD pengampu sesuai urusan dan tupoksi, sebagai berikut:

1. Bahwa pronangkis masih berkuat di persoalan database kemiskinan. Seringkali data tidak valid dan tidak tepat sasaran. Ini terlihat saat pemberian bantuan sosial, banyak sekali kasus ditemukan bahwa warga yang mampu masih mendapatkan bantuan, sebaliknya mereka yang memang secara factual di lapangan miskin, tidak mendapatkan bantuan karena namanya tidak masuk dalam data base penduduk miskin
2. Bahwa perubahan status sosial warga di lapangan seperti warga yang pindah domisili, perubahan status karena pernikahan bahkan meninggal dunia, tidak segera disesuaikan dengan data base atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
3. Bahwa warga miskin dipengaruhi oleh siapa yang menjabat di pemerintahan desa, terutama Kepala Desa. Warga yang benar-benar miskin sangat mungkin tetap tidak akan mendapatkan bantuan karena mereka menjadi lawan politik saat pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.
4. Bahwa SKPD pengampu urusan bekerja terlalu formal menangani kemiskinan. Pada umumnya unit kerja pun tidak menguasai data base, mengintervensi pronangkis secara acak bahkan tidak memahami konsepsi pronangkis itu sendiri. Sehingga sangat mungkin terjadi di lapangan, intervensinya tidak tepat sasaran. Antara rencana dan pelaksanaan tidak sinkron. Lebih buruknya lagi, bahwa pelayanan public yang multi sektor tersebut dilakukan terkotak-kotak. Tidak ada integrasi system layanan untuk memudahkan, mempercepat layanan warga miskin sesuai keperluan.

Sebagai contoh saat warga miskin memerlukan administrasi pembuatan surat keterangan tidak mampu, kartu jaminan kesehatan, kartu Indonesia pintar, atau sekedar KTP/ Kartu

Keluarga, warga miskin harus menyelesaikannya dari mulai tingkat kantor desa hingga ke beberapa kantor SKPD. Hal ini tentu menguras waktu, energi atau biaya bila memang secara formal ada ketentuan pembiayaan. Jelas, warga miskin akan makin berat dengan gaya pelayanan seperti ini. Banyak waktu produktif terbuang, karena layanan terlalu birokratif, Panjang dan berbelit-belit.

Memperhatikan banyak sekali permasalahan kemiskinan yang ditimbulkan karena system layanan yang buruk, maka beberapa ASN mencoba membentuk suatu forum diskusi (FGD) pronangkis Kabupaten Cirebon. Berharap dengan forum ini, pendekatan pronangkis dapat lebih fleksible namun tetap focus terhadap permasalahan yang sama dengan orang-orang yang berwawasan dan memiliki visi yang sama pula.

Berawal dari hanya dua hingga lima orang ASN penggagas, selanjutnya jumlah peserta FGD makin bertambah dan solid. Terbentuklah FGD Pronangkis Kabupaten Cirebon.

Benchmarking ke luar daerah

Berbekal semangat dan visi yang sama, beberapa ASN lintas SKPD melakukan studi banding terkait penanggulangan kemiskinan daerah ke Banyuwangi Jawa Timur pada Tahun 2017. Banyuwangi, sesuai referensi, adalah lokus yang tepat untuk belajar bagaimana aspek kesejahteraan sosial diperbaiki. Beberapa poin penting yang dapat kami ambil adalah :

- 1) Terdapat komitmen kuat dalam pronangkis dari para pemimpin kebijakan. Mereka memahami konsepsi kesejahteraan sosial secara mendalam dan benar-benar mengawal implementasinya di lapangan;
- 2) Karena leader grup berkomitmen, maka level akar rumput (staf) di jajaran birokrasi pun ikut secara otomatis. Perubahan sosial dan iklim bekerja lebih cepat terjadi karena para pimpinan yang memulai terlebih dahulu;
- 3) Terjadi jejaring kerja yang kuat antar pemangku kepentingan pembangunan : pemerintah, akademisi, swasta dan komunitas masyarakat. Pronangkis dikerjakan sesuai peran masing-masing dan dilakukan evaluasi sebagai tindak pengendaliannya oleh pemerintah daerah;
- 4) Banyak sekali program inovasi yang dilakukan. Program rantang kasih menjadi inovasi cerdas yang dilakukan pemda Kabupaten Banyuwangi. Rantang kasih adalah program pemberian santunan sosial berupa makanan kepada keluarga miskin, terutama lansia, dengan memberdayakan ekonomi lokal. Warung-warung makanan akan mengantar

makanan kepada warga miskin di tempatnya dengan jaminan pembayaran dari pemerintah daerah.

- 5) Perusahaan setempat sangat aktif melaksanakan program CSR sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat lokal. Ada pembangunan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana infrastruktur jalan, drainase dan penerangan bahkan program edukasi dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan usaha warga miskin.
- 6) Pelibatan Desa dalam pronangkis melalui APBDes sesuai tema intervensi. Pemda membuat kebijakan afirmatif kepada pemerintah desa untuk menganggarkan pronangkis tematik seperti perbaikan rutilahu, pemberian makanan tambahan (PMT) kepada bumil/ balita keluarga miskin, beasiswa miskin dst sesuai sumber daya keuangan yang dimiliki. Pemerintah menentukan besaran minimum yang tidak memberatkan desa dengan pedoman teknis pelaksanaannya.

Banyuwangi menginsiprasi banyak orang dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Pada awalnya angka kemiskinan cukup tinggi, namun dengan pendekatan yang tepat dimulai satu komitmen yang kuat terutama dari para pengambil kebijakan, akhirnya kinerja pronangkis pun mulai dapat dirasakan. Inilah yang menginspirasi awal ASN Kabupaten Cirebon untuk memperbaiki profil kemiskinan daerah.

Penyatuan Visi, hasil benchmarking : pembentukan grup wa Pronangkis

Belajar dari pengalaman yang didapatkan dari Kabupaten Banyuwangi, maka kami sepakat untuk membuat WhatsApp group Pronangkis Kabupaten Cirebon. Group diinisiasi awal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan beberapa SKPD pengampu urusan sosial, kesehatan, pemberdayaan Masyarakat desa, kependudukan dan catatan sipil serta komunikasi dan informasi.

Seperti yang dilakukan Banyuwangi dalam menanggulangi kemiskinan secara kolektif, tujuan Grup WA Pronangkis adalah untuk pertama menyamakan visi dan misi pronangkis daerah lintas sectoral (model pentahelix) sehingga kinerja penurunannya dapat lebih optimal. Seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah desa, SKPD, korporasi perusahaan, akademisi, LSM, organisasi keagamaan hingga masyarakat langsung terlibat dalam grup komunikasi tersebut. Penyamaan persepsi ini sangat penting sebagai modal utama pembangunan komitmen dan jejaring sosial untuk mempercepat dan memudahkan tim bekerja.

Kedua, setelah grup WA terbentuk, pelayanan masyarakat miskin seperti : pembuatan administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan, bantuan pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi mulai dari desa dan skpd pengampu, sehingga hasilnya dapat cepat, akurat dan murah. Tujuan grup dengan sarana media sosial ini adalah untuk merubah pola kerja dari formal menjadi informal.

Kemiskinan merupakan gejala sosial yang perubahannya sangat cepat sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih lentur dengan mengubah gaya komunikasinya, lebih banyak unsur yang terlibat dan menghilangkan sekat kepentingan.

Ketiga, pembentukan grup wa pronangkis bertujuan untuk menginformasikan kondisi masyarakat miskin secara cepat (real time) kepada pihak-pihak yang seharusnya menangani sesuai otoritas, tugas dan fungsinya.

Pronangkis selama ini hanya dilakukan berdasarkan acuan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD. Faktanya di lapangan seringkali, kebutuhan masyarakat miskin melebihi cakupan formal target kinerja kemiskinan yang tertuang dalam DPA. Sebagai contoh, SKPD hanya menargetkan penurunan jumlah warga miskin dalam satu periode. Bahwa kriteria warga miskin berikut kebutuhan hidup yang akan diturunkan tersebut, SKPD seringkali tidak begitu memahaminya. Hal itu dapat diketahui langsung dan berkembang saat komunikasi terjadi dalam grup wa pronangkis.

SKPD sangat mungkin memberikan bantuan yang salah sasaran karena ternyata warga miskin yang selama ini mendapatkan bansos sesuai data base kemiskinan (DTKS) sudah berubah : bisa pindah domisili ataupun meninggal dunia. Sehingga tim berpandangan bahwa pronangkis tetap harus diselesaikan oleh pengampu urusan namun metode kerja perlu disempurnakan dengan system komunikasi dan kordinasi yang lebih baik. Dengan perubahan pengetahuan itu maka skpd akan merubah juga rencana dan basis anggarannya.

Hal paling utama dalam perubahan gaya komunikasi ini adalah bahwa sistem komando pun ikut berubah atau setidaknya dipengaruhi oleh diskursus yang berkembang dalam grup wa tersebut. Seorang pimpinan SKPD dapat langsung memerintahkan stafnya saat ada warga miskin yang memerlukan aktifasi kartu jaminan kesehatannya (KIS). Pimpinan SKPD tidak merasa nyaman bila urusan KIS tidak segera ditangani karena memang menjadi tupoksi-nya, sementara anggota grup terus memantau di grup wa. Staf SKPD akan bergerak langsung

untuk menyelesaikannya, karena bertanggungjawab memenuhi pekerjaan tersebut.

Karena kepala daerah pun masuk sebagai anggota grup maka pengetahuan tentang masyarakat miskin dapat lebih lengkap, hal ini mendorongnya untuk melakukan briefing atau rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan SKPD dalam rangka menyelesaikan persoalan kemiskinan sesuai keperluan.

Aksi Pronangkis berbasis ASN

Setelah visi yang sama, komitmen terbangun dan sistem komunikasi pun diperbaiki melalui media sosial, maka pronangkis pun dapat dilakukan lebih baik dan terencana. Hal itu dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

Aksi Bappeda :

Untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja penurunan kemiskinan, Bappeda mulai mengalokasikan anggaran khusus Dinas Sosial untuk kegiatan verifikasi dan validasi penduduk miskin. Kegiatan ini sangat esensial, karena validitas data base warga miskin menjadi pintu awal perencanaan pronangkis itu sendiri. Bappeda pun membuat satu sistem aplikasi perencanaan pembangunan untuk menghubungkan antara data pronangkis dengan perencanaan dan penganggaran lintas SKPD. Hal itu dimaksudkan agar semua kegiatan yang berkaitan dengan kemiskinan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat program.

Aksi Dinas Sosial :

Selain melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan, Dinsos pun membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 412 Desa dan 12 Kelurahan se Kabupaten Cirebon. Puskesos merupakan organisasi yang dibentuk di bawah sub koordinasi Kepala Desa untuk memudahkan dalam hal pendataan warga miskin, mengidentifikasi kebutuhannya dan mengkoordinasikannya kepada mitra kerja lain atau SKPD.

Aksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) :

Simpangan data karena perubahan status sosial penduduk, mulai diperbaiki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bersama dengan pemerintah Desa dan Kecamatan, Disdukcapil mensinkronkan data penduduk miskin berdasarkan NIK, terutama mereka yang sudah pindah domisili atau meninggal dunia.

Jumlah penduduk miskin yang masih mendapatkan bantuan padahal ternyata orangnya sudah meninggal, jumlahnya cukup banyak. Hal ini tentu akan mengefisiensikan anggaran pembayaran jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin serta kebutuhan anggaran bantuan sosialnya.

Aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Sebagai upaya penanganan kemiskinan di akar rumput_karena sebenarnya Pembangunan daerah berbasis desa maka DPMD menyusun Surat Edaran Bupati Cirebon beserta lampiran SK yang mengintruksikan ada partisipasi pronangkis secara afirmatif dalam APBDes. Hal ini sangat strategis dalam efesiensi perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sebagai contoh, sebagai bagian dari kebijakan afirmatif itu diantaranya : Desa harus menganggarkan biaya tambahan honorarium petugas puskesmas, biaya kegiatan dukungan pendataan (*verval*) warga miskin, pemberian bantuan pangan bagi lansia, perempuan tulang punggung keluarga dan balita miskin, anggaran pembangunan rumah tidak layak huni, beasiswa miskin

Aksi Dinas Kesehatan :

Untuk mengantisipasi kebutuhan pengobatan penduduk miskin yang sakit, Dinas Kesehatan mengalokasikan tambahan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah. Faktanya di lapangan, warga miskin yang berobat di puskesmas atau rumah sakit, belum masuk dalam DTKS sehingga mereka pun belum tercatat sebagai penerima PBI daerah. Dinkes, bekerjasama dengan puskesmas desa dan Dinsos, melakukan pendataan kepesertaan PBI secara real time agar layanan kesehatan gratis warga miskin dapat dilakukan dengan baik.

Aksi Dinas Pendidikan :

Untuk mengurangi beban pendidikan siswa miskin, Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran beasiswa miskin serta penguatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk keperluan sekolah terutama siswa miskin. Selain itu, Dinas Pendidikan pun mensinkronkan data siswa miskin tersebut dengan DTKS yang diampu oleh Dinsos.

Aksi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) :

Sebagai pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal warga miskin, DPKPP membuka 3 slot program bantuan pembangunan rumah layak huni dari Kementerian PUPR, Propinsi dan pemerintah daerah sendiri. Melalui puskesmas, para fasilitator rutilahu DPKPP menjangkau data calon penerima manfaat pembangunan rumah layak huni (rutilahu). Program ini sangat berarti bagi warga miskin untuk mendapatkan rumah yang aman secara konstruksi, sehat secara sanitasi dan nyaman ditinggali.

Aksi ASN dalam grup WA Pronangkis dan kinerja penanggulangan kemiskinan daerah

Masih banyak praktik baik yang dilakukan oleh SKPD, dan itu dapat berjalan karena efektifnya komunikasi dan koordinasi grup WA pronangkis yang basisnya adalah ASN Kabupaten Cirebon. Saat ada informasi warga miskin yang harus berobat ke luar kota, maka ASN langsung bergerak, menghimpun dana urunan sesuai kemampuan dan memberikannya kepada pasien miskin tersebut. Pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS, memang tidak mengeluarkan biaya pengobatan, namun kebutuhan hidup sehari-hari pasien dan khususnya keluarga penunggu pasien selama berobat di luar kota, tentu memerlukan pembiayaan.

Anggota grup pronangkis berjumlah 180 orang, terdiri dari beragam latar belakang profesi : ASN, akademisi, pemeritah desa, perusahaan swasta, organisasi filantropi Baznas, Sedekah Rombongan, Karang Taruna, Puskesmas Desa hingga LSM dan komunitas Masyarakat. Bila dirata-ratakan satu kali penggalangan dana informal per orang Rp.100.000 saja, maka dana sosial yang didapat berdasarkan rasa kemanusiaan yang sama sebesar Rp. 18.000.000 dalam hitungan menit sangat mudah didapatkan. Hal ini tentu sangat tidak mungkin bila dilakukan dengan pendekatan APBD/ Des yang lebih formal. Mengingat administrasi keuangan pemerintah daerah/ desa yang lebih kaku dan rigid.

Personil grup pronangkis memiliki komitmen kuat menanggulangi kemiskinan bersama. Saat ada informasi kebutuhan layanan warga miskin yang sangat mendesak : pembuatan administrasi kependudukan, syarat bantuan sosial, usulan keperluan pembangunan rumah layak huni yang ambruk akibat bencana, pengantaran warga yang sakit, kebutuhan alat bantu bagi difable dst., anggota grup akan langsung respon dan bertindak konkrit berupa bantuan material ataupun bantuan teknis di lapangan. Ini cukup efektif mempermudah dan mempercepat layanan kepada warga miskin yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih birokratif sehingga outputnya bagi penduduk miskin cenderung kompleks, lama dan berbiaya

tinggi.

Kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Cirebon pernah dalam pencapaian yang ideal. Mulai ada perubahan hasil setelah pronangkis melibatkan banyak unsur pembangun daerah melalui motor penggerak ASN secara informal. Data BPS Kabupaten melaporkan prosentasi penduduk miskin di Kabupaten Cirebon 2017-2019 secara berurutan yaitu : 12,97% (2017), 10,70 (2018) dan 9,94% (2019)

Namun angka ini agak terganggu dan kembali naik saat terjadi pandemi covid -19 dari mulai tahun 2019, 2020 dan 2021 secara berurutan prosentase penduduk miskin terus mengalami kenaikan rata-rata 1.7% per tahun di Kabupaten Cirebon yaitu 9,94%, 11,24% dan 12,30%.

Setelah pandemi berakhir, jumlah penduduk miskin mulai menurun kembali yaitu sebesar 12,01% pada Tahun 2022, 11,20% pada Tahun 2023 dan menurun 0,2% menjadi 11% pada Tahun 2024. (BPS Kabupaten Cirebon).

SIMPULAN

Kemiskinan merupakan inti persoalan pembangunan. Sesuai tujuan negara yang tertuang dalam Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, Negara memiliki kewajiban untuk : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka sudah sepantasnya keberadaan penduduk miskin menjadi agenda utama pembangunan. Kemiskinan harus dientaskan karena kontra produktif dengan cita-cita berdirinya negara Indonesia sesuai visi mulia yang tertuang dalam konstitusinya.

Penanganan kemiskinan terkendala oleh persoalan klasik berupa lemahnya penguasaan data yang berdampak terhadap efektifitas perencanaan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, serta soal substansi masalah kordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan pembangunan untuk menangani permasalahan yang sama. Kondisi ini berdampak kepada layanan public penduduk miskin yang kompleks, birokratif dan berbiaya tinggi sehingga jumlah beban pengeluaran warga miskin makin berat.

Memperhatikan ini, ASN di Kabupaten Cirebon menawarkan solusi dan telah mulai melakukan praktik baik berupa pronangkis berbasis ASN. Prinsip sederhana yang digagas adalah metode pendekatan pronangkis dengan memperbaiki sistem berkomunikasi lintas sectoral dalam penanganan permasalahan sosial kemiskinan.

Hasilnya cukup terasa, setelah pembentukan FGD pronangkis dengan motor penggerak ASN yang bekerja lebih lentur dan langsung ke sasaran dengan melibatkan semua mitra pembangunan, kinerja penanggulangan kemiskinan membaik. Setidaknya angka penduduk miskin menurun rata-rata 1,5% per tahun sejak 2017-2019. Pronangkis berbasis ASN bukan hanya program formal pemerintah namun menjadi suatu gerakan moral yang dilakukan bersama dan menjadi inspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatikha, A. C. (2016). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/78>
- Ismail, I. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 110-134. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/545>
- Quran Kemenag : <https://quran.kemenag.go.id>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87-103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, edisi 9, jilid 1. Erlangga.
- Yunmmi, T. propoor go dalam pelayanan publik'. (<https://www.neliti.com/id/publications/72957/pro-poor-governance-dalam-pelayanan-publik>)